

Pendampingan Pemutakhiran Melalui Pendataan Kelahiran dan Kematian Sebagai Upaya Peningkatan Tertib Administrasi di Kelurahan Bontoramba

A. Fitriani Suryadi¹, Sheruni², Pipit Amelia Syan³, Dini Aminarti⁴, Cahya Kamila⁵, Anis Pratiwi⁶, Putri Amanda⁷, Nia Ramadhani Tumpu⁸, Irmawati⁹, Siska¹⁰, S Muh. Tirta¹¹, Maulidika BS¹²

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Turatea Indonesia, Indonesia
Email: a.fitrianisuryadi30@gmail.com

Abstrak

Tertib administrasi kependudukan merupakan prasyarat mendasar bagi keberhasilan perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, namun praktiknya masih terkendala rendahnya kesadaran warga dalam melaporkan peristiwa kelahiran dan kematian secara aktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola dan kesenjangan pelaporan peristiwa kependudukan di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, serta mengevaluasi kontribusi program pendampingan pemutakhiran data terhadap peningkatan tertib administrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data primer hasil pendataan langsung di lima lingkungan: Bontoramba, Dangko, Tombolo, Bulucenrana, dan Moncong-Moncong. Hasil pendataan mencatat 58 peristiwa kematian berbanding hanya 4 peristiwa kelahiran, menghasilkan rasio kelahiran terhadap kematian sebesar 0,07:1. Lingkungan Bulucenrana menyumbang proporsi kematian tertinggi (32,3%), sementara tiga dari lima lingkungan tidak melaporkan satu pun peristiwa kelahiran, mengindikasikan kesenjangan pelaporan yang serius dan berpotensi mendistorsi basis data kependudukan kelurahan. Temuan ini mengonfirmasi sekaligus memperluas teori registrasi vital pasif, yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berbasis inisiatif warga cenderung menghasilkan data kelahiran under-recorded dibanding data kematian. Kebaruan penelitian terletak pada penyajian pola disparitas antarlingkungan dalam satu kelurahan yang belum banyak diungkap dalam literatur administrasi kependudukan berbasis KKN, serta rekomendasi model pendampingan berjenjang RT/RW-kelurahan.

Kata kunci: Pemutakhiran; Kelahiran; kematian; Administrasi

Abstract

Orderly population administration is a fundamental prerequisite for successful development planning at the village/sub-district (kelurahan) level. In practice, however, this is hindered by low community awareness in actively reporting births and deaths. This study aims to analyze the patterns and gaps in vital event reporting in Kelurahan Bontoramba, Bontoramba Sub-district, Jeneponto Regency, and to evaluate the contribution of a data-updating assistance program to improving administrative order. Using a descriptive quantitative approach, the study relies on primary data collected directly across five neighborhoods (lingkungan): Bontoramba, Dangko, Tombolo, Bulucenrana, and Moncong-Moncong. The data recorded 58 death events against only 4 birth events, yielding a birth-to-death ratio of 0.07:1. Bulucenrana accounted for the highest proportion of deaths (32.3%), while three of the five neighborhoods reported no births at all, indicating a serious reporting gap that risks distorting the sub-district's population database. These findings confirm and extend passive vital registration theory, which posits that citizen-initiative-based reporting systems tend to produce under-recorded birth data relative to death data. The novelty of this study lies in presenting inter-neighborhood disparity patterns within a single kelurahan—an aspect rarely explored in community-service (KKN)-based population administration literature—along with a recommendation for a tiered RT/RW-to-kelurahan assistance model. The practical implication is the need to strengthen the role of neighborhood cadres and enhance synergy between the kelurahan and the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) to close the identified reporting gaps.

Keywords: population administration; birth and death data collection; administrative order; community assistance; Kelurahan Bontoramba

Keywords: Data Updating; Birth Registration; Death Registration; Administrative Services.

1. PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan instrumen dasar penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin ketersediaan data akurat, mutakhir, dan akuntabel bagi perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, serta pelayanan public [1]. Dua peristiwa penting kependudukan yang menjadi indikator dinamika demografis suatu wilayah adalah kelahiran dan kematian. Data kelahiran dan kematian tidak hanya menjadi dasar penghitungan pertumbuhan penduduk alami, tetapi juga menjadi rujukan bagi berbagai sektor pembangunan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga alokasi anggaran desa. Sayangnya, sistem pencatatan sipil di Indonesia pada dasarnya bersifat pasif, yakni pemerintah menunggu laporan dari warga, sementara tidak semua warga memiliki kesadaran dan kedisiplinan untuk melaporkan peristiwa penting yang terjadi dalam keluarganya. Sejumlah studi mutakhir menunjukkan bahwa pemutakhiran data di tingkat lokal perlu dilakukan berkelanjutan karena data kependudukan berubah mengikuti kelahiran, kematian, perpindahan, dan perubahan struktur keluarga. Darmawan et al. (2022) menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dan pemutakhiran dokumen kependudukan. Pada tingkat komunitas, Kurniati (2023) menunjukkan bahwa pendampingan kepada pengurus RW dapat menghasilkan data penduduk yang lebih valid dan akurat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tertib administrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan unsur masyarakat paling dekat dengan warga.

Persoalan tersebut secara khusus teridentifikasi di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan pendataan yang dilakukan tim pendamping bersama aparat lingkungan pada enam lingkungan (secara administratif tercatat lima lingkungan yang melaporkan data lengkap, yaitu Bontoramba, Dangko, Tombolo, Bulucenrana, dan Moncong-Moncong), tercatat 58 peristiwa kematian berbanding hanya 4 peristiwa kelahiran. Disparitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah rendahnya angka kelahiran yang tercatat mencerminkan kondisi demografis riil, ataukah merupakan artefak dari lemahnya sistem pelaporan warga, khususnya untuk peristiwa kelahiran yang secara empiris lebih jarang dianggap mendesak untuk segera dilaporkan dibandingkan kematian yang berkaitan langsung dengan pengurusan pemakaman dan administrasi waris.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai administrasi kependudukan di Indonesia umumnya berfokus pada dua ranah besar: (1) pengembangan sistem informasi atau aplikasi digital untuk pencatatan kependudukan di tingkat desa/kelurahan [2], dan (2) evaluasi implementasi kebijakan administrasi kependudukan di tingkat kabupaten/kota [3]. Studi-studi tersebut secara umum menyimpulkan bahwa rendahnya kesadaran pelaporan warga dan lemahnya infrastruktur pencatatan menjadi faktor utama buruknya kualitas data kependudukan. Namun, riset gap yang teridentifikasi adalah minimnya kajian yang secara spesifik membandingkan pola disparitas pelaporan kelahiran dan kematian antarlingkungan/RT-RW dalam satu wilayah kelurahan yang sama, serta minimnya penelitian yang mengintegrasikan kegiatan pendampingan langsung (bukan sekadar pengembangan sistem) sebagai bagian dari strategi intervensi berbasis data. Sebagian besar penelitian juga masih menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif tanpa penyajian data kuantitatif komparatif antarwilayah administratif terkecil. Perkembangan kajian tersebut menunjukkan bahwa strategi perbaikan administrasi dapat dilakukan melalui kombinasi edukasi, pendampingan, penguatan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi. Lydia dan Wibawani (2023), misalnya, menemukan bahwa pendampingan layanan adminduk di tingkat RW membantu masyarakat memperoleh layanan dokumen kelahiran dan kematian secara lebih mudah. Rohim (2023) juga memperlihatkan bahwa pendekatan door to door dapat digunakan untuk menertibkan administrasi kependudukan pada tingkat kelurahan. Sementara itu, Anugrah et al. (2023) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di desa masih dipengaruhi keterbatasan sarana, keterbukaan informasi, dan kompetensi petugas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini secara eksplisit diarahkan untuk mengisi tiga celah: pertama, menyajikan analisis kuantitatif komparatif pola pelaporan kelahiran dan kematian antarlingkungan dalam satu kelurahan; kedua, mengonfirmasi relevansi teori registrasi vital pasif dalam konteks kelurahan berskala kecil yang selama ini kurang menjadi objek kajian akademik dibandingkan wilayah perkotaan besar; dan ketiga, merumuskan rekomendasi

model pendampingan yang kontekstual dan aplikatif bagi kelurahan dengan karakteristik serupa. Urgensi penelitian ini semakin nyata mengingat data kependudukan yang tidak akurat pada level kelurahan akan terakumulasi menjadi distorsi data pada level kecamatan, kabupaten, hingga nasional, sehingga berpotensi mengganggu efektivitas program pembangunan yang berbasis data (data-driven policy).

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan dan menganalisis pola distribusi peristiwa kelahiran dan kematian di lima lingkungan Kelurahan Bontoramba; (2) mengidentifikasi disparitas pelaporan antarlingkungan dan faktor-faktor yang diduga memengaruhinya; dan (3) mengevaluasi kontribusi kegiatan pendampingan pemutakhiran data terhadap peningkatan tertib administrasi kependudukan di kelurahan tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan desain studi kasus (case study) pada satu wilayah kelurahan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan membandingkan distribusi frekuensi peristiwa kelahiran dan kematian secara numerik antarlingkungan, sehingga memungkinkan analisis proporsi dan rasio yang terukur.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer hasil pendataan langsung yang dilakukan oleh tim mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak bersama aparat lingkungan di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, yang mencakup lima lingkungan, yaitu Bontoramba, Dangko, Tombolo, Bulucenrana, dan Moncong-Moncong. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terhadap buku register lingkungan, wawancara terstruktur dengan kepala lingkungan/kader, serta verifikasi silang (cross-check) dengan warga pada saat kegiatan kunjungan sosial dan pemutakhiran data berlangsung.

Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, meliputi penghitungan frekuensi, proporsi (persentase) tiap lingkungan terhadap total peristiwa, serta rasio kelahiran terhadap kematian sebagai indikator keseimbangan pelaporan demografis. Data disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan grafik batang untuk memudahkan interpretasi pola antarlingkungan. Analisis selanjutnya diinterpretasikan secara kualitatif-argumentatif dengan merujuk pada teori registrasi vital pasif dan studi terdahulu guna memberikan penjelasan atas pola data yang ditemukan, termasuk mengidentifikasi kemungkinan under-reporting sebagai penjelasan alternatif atas rendahnya angka kelahiran yang tercatat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Distribusi data peristiwa kelahiran dan kematian

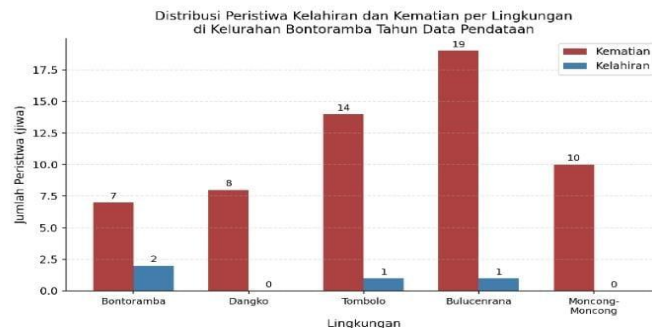
Hasil pendataan pada lima lingkungan di kelurahan Bontoramba di sajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Distribusi Peristiwa Kelahiran dan Kematian per lingkungan di Kelurahan Bontoramba

Lingkungan	Kematian (jiwa)	Kelahiran (Jiwa)	Jumlah Peristiwa
Bontoramba	7	2	9
Dangko	8	0	8
Tombolo	14	1	15
Bulucenrana	19	1	20
Moncong-Moncong	10	0	10
Total	58	4	62

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari total 62 peristiwa kependudukan yang tercatat, sebanyak 58 peristiwa (93,5%) merupakan peristiwa kematian, sementara hanya 4 peristiwa (6,5%) merupakan peristiwa kelahiran. Rasio keseluruhan kelahiran terhadap kematian di Kelurahan Bontoramba adalah 0,07:1, jauh di bawah kondisi demografis wajar suatu wilayah yang

secara alami memiliki angka kelahiran kasar lebih tinggi atau setidaknya sebanding dengan angka kematian kasar, kecuali pada populasi dengan struktur usia sangat tua atau mengalami migrasi keluar besar-besaran usia produktif Untuk memperjelas pola distribusi antarlingkungan, Gambar 1 menyajikan visualisasi perbandingan jumlah kematian dan kelahiran.



Gambar 1. Grafik Perbandingan Jumlah Peristiwa Kematian dan Kelahiran per Lingkungan

Gambar 1 memperlihatkan bahwa Lingkungan Bulucenrana mencatat jumlah kematian tertinggi (19 jiwa), diikuti Tombolo (14 jiwa), Moncong-Moncong (10 jiwa), Dangko (8 jiwa), dan Bontoramba (7 jiwa). Sebaliknya, untuk peristiwa kelahiran, hanya Lingkungan Bontoramba yang mencatat lebih dari satu kelahiran (2 jiwa), sementara Tombolo dan Bulucenrana masing-masing mencatat satu kelahiran, dan Dangko serta Moncong-Moncong tidak mencatat kelahiran sama sekali (nihil) selama periode pendataan.

3.2 Analisis Proporsi dan Rasio Antarlingkungan

Tabel 2 menyajikan proporsi kontribusi tiap lingkungan terhadap total peristiwa serta rasio kelahiran terhadap kematian pada masing-masing lingkungan.

Tabel 2. Proporsi dan rasio kelahiran terhadap kematian per lingkungan

Lingkungan	Total Peristiwa	Proporsi thd Total	Rasio kelahiran: kematian
Bontoramba	9	14,5%	0,29 : 1
Dangko	8	12,9%	0,00 : 1
Tombolo	15	24,2%	0,07 : 1
Bulucenrana	20	32,3%	0,05 : 1
Moncong-Moncong	10	16,1%	0,00 : 1
Total	62	100%	0,07 : 1

Analisis pada Tabel 2 mengungkap tiga temuan penting. Pertama, Lingkungan Bulucenrana menyumbang proporsi tertinggi terhadap total peristiwa kependudukan (32,3%), namun kontribusi ini didominasi oleh kematian, bukan kelahiran, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah tingginya angka kematian di lingkungan ini mencerminkan struktur usia penduduk yang relatif tua, ataukah justru mengindikasikan pelaporan kematian yang lebih tertib dibandingkan pelaporan kelahiran pada lingkungan yang sama. Kedua, dua dari lima lingkungan (Dangko dan Moncong-Moncong) tidak melaporkan satu pun peristiwa kelahiran, sebuah pola nihil yang secara statistik jarang mengingat kedua lingkungan tersebut tetap mencatat jumlah kematian cukup signifikan (8 dan 10 jiwa). Kejanggalan inilah yang menjadi salah satu novelty temuan penelitian ini, yakni disparitas pelaporan bukan semata-mata fenomena kabupaten/kota secara agregat sebagaimana banyak diulas penelitian terdahulu, melainkan juga terjadi secara tajam antarlingkungan dalam satu kelurahan yang sama. Temuan tersebut perlu dibaca sebagai sinyal kualitas pelaporan, bukan sebagai bukti langsung bahwa kelahiran di kedua lingkungan benar-benar tidak terjadi. Ketiadaan laporan dapat muncul karena warga belum memahami

prosedur, belum melihat urgensi administratif, atau belum memperoleh pendampingan yang memadai. Darmawan et al. (2022) menempatkan kesadaran masyarakat sebagai unsur penting dalam keberhasilan tertib dokumen, sedangkan Kurniati (2023) memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas pengurus lingkungan dapat membantu menyediakan data yang lebih akurat. Oleh karena itu, angka nihil perlu ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan sebelum digunakan sebagai dasar kebijakan.

Ketiga, rasio kelahiran terhadap kematian pada level kelurahan (0,07:1) jauh lebih rendah dibandingkan rasio yang lazim dilaporkan pada studi tingkat kota, misalnya data Kota Bandung yang menunjukkan tren penurunan angka kematian bayi dari 24 per 1.000 kelahiran (2015) menjadi 18 per 1.000 kelahiran (2023), yang mengindikasikan sistem pencatatan yang relatif lebih mapan pada level kota besar dibandingkan kelurahan pedesaan seperti Bontoramba. Perbandingan ini memperkuat argumen bahwa kualitas pencatatan administrasi kependudukan sangat bergantung pada tingkat pemerintahan dan kapasitas kelembagaan setempat, sebagaimana ditegaskan oleh temuan dalam Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat bahwa akurasi dan kemitakhiran data kependudukan di tingkat kelurahan/desa akan menentukan akurasi data pada tingkat kecamatan, kabupaten, hingga nasional.

3.3 Interpretasi Berdasarkan Teori Registrasi Vital Pasif

Temuan rendahnya angka kelahiran yang tercatat dibandingkan kematian konsisten dengan teori registrasi vital pasif yang menjelaskan bahwa insentif pelaporan warga sangat dipengaruhi oleh urgensi administratif. Kematian umumnya dilaporkan segera karena berkaitan dengan pengurusan pemakaman, klaim jaminan sosial, dan penyesuaian status kartu keluarga, sedangkan kelahiran anak sering kali baru dilaporkan ketika keluarga memerlukan akta kelahiran untuk keperluan pendidikan atau administrasi lain di kemudian hari, bahkan tidak jarang tertunda hingga bertahun-tahun. Pola ini memperkuat temuan sekaligus memperluasnya ke konteks kelurahan berskala kecil di kawasan pedesaan Sulawesi Selatan, yang selama ini belum banyak menjadi objek kajian empiris. Dalam kerangka pelayanan publik, urgensi administratif merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perilaku pelaporan. Peristiwa kematian biasanya segera berhubungan dengan kebutuhan dokumen dan perubahan data keluarga, sedangkan kelahiran dapat ditunda pelaporannya ketika keluarga belum membutuhkan dokumen tertentu. Karena itu, edukasi perlu menjelaskan bahwa setiap perubahan status kependudukan sebaiknya segera dilaporkan. Pengalaman program pendampingan layanan administrasi di tingkat RW menunjukkan bahwa pendekatan yang dekat dengan warga dapat meningkatkan kemudahan akses dan pemahaman masyarakat (Lydia & Wibawani, 2023; Dyah, 2024). (Aini & Mursyidah, 2023).

Selain faktor urgensi administratif, disparitas antarlingkungan juga diduga dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas dan keaktifan kader/kepala lingkungan dalam menjalankan fungsi pendataan, sejalan dengan temuan bahwa Rukun Tetangga/lingkungan merupakan garda terdepan pengumpulan data kependudukan yang akurat dan mutakhir. Ketiadaan laporan kelahiran di Lingkungan Dangko dan Moncong-Moncong kemungkinan besar bukan mencerminkan kondisi demografis riil, melainkan indikasi lemahnya mekanisme pelaporan aktif di kedua lingkungan tersebut, sehingga memerlukan intervensi pendampingan yang lebih intensif dibandingkan lingkungan lain.

3.4 Kontribusi Kegiatan Pendampingan terhadap Tertib Administrasi

Kegiatan pendampingan pemutakhiran data yang dilakukan tim KKN berkontribusi pada tiga aspek utama tertib administrasi kependudukan. Pertama, aspek identifikasi kesenjangan data, yaitu teridentifikasinya lingkungan-lingkungan dengan tingkat pelaporan kelahiran yang sangat rendah atau nihil, sehingga aparat kelurahan dapat memprioritaskan intervensi pada lingkungan tersebut. Kedua, aspek penguatan kesadaran warga melalui kunjungan sosial langsung yang dilakukan tim pendamping ke enam hamlet, yang berfungsi sebagai sosialisasi informal mengenai pentingnya pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana diamanatkan Pasal 59 UU No. 24/2013 tentang kewajiban sosialisasi administrasi kependudukan. Ketiga, aspek dokumentasi dan rekapitulasi data yang terstruktur, yang dapat menjadi baseline bagi kelurahan

untuk verifikasi data berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 2 PP No. 40/2019 tentang pemutakhiran data secara berkala.

Kontribusi dan novelty penelitian ini secara ringkas terletak pada tiga hal. Pertama, penyediaan bukti empiris kuantitatif mengenai disparitas pelaporan kelahiran-kematian pada level lingkungan dalam satu kelurahan, yang jarang diungkap penelitian terdahulu yang umumnya beroperasi pada level kabupaten/kota. Kedua, pengintegrasian kegiatan pendampingan lapangan (bukan hanya pengembangan sistem digital) sebagai bentuk intervensi berbasis data primer KKN, yang memperkaya literatur pengabdian masyarakat berbasis administrasi kependudukan yang selama ini didominasi kajian pengembangan aplikasi/sistem informasi. Ketiga, kontekstualisasi temuan pada wilayah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang memperluas cakupan geografis studi administrasi kependudukan di Indonesia yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya kelurahan dan Disdukcapil Kabupaten Jeneponto merancang mekanisme pendampingan berjenjang RT/RW-kelurahan yang lebih terstruktur, termasuk pelatihan kader lingkungan dalam pencatatan peristiwa penting, penjadwalan verifikasi data berkala minimal setiap enam bulan mengikuti praktik terbaik yang telah diterapkan di beberapa kota besar melalui sistem Data Konsolidasi Bersih (DKB), serta pemanfaatan momentum kegiatan sosial kemasyarakatan (seperti pengajian, arisan, atau posyandu) sebagai kanal sosialisasi pelaporan peristiwa kependudukan secara berkelanjutan.



(a)



(b)

Gambar 2. Pendataan (a) Pemutakhiran data Kelahiran dan kematian (b) UMKM

Kegiatan pada gambar (a) merupakan proses pendataan pemutakhiran data kelahiran dan kematian yang dilaksanakan melalui metode door to door. Mahasiswa KKN mendatangi rumah warga untuk melakukan verifikasi dan pembaruan informasi terkait jumlah kelahiran maupun kematian yang terjadi di lingkungan tersebut. Data diperoleh melalui wawancara dengan warga dan dicatat langsung menggunakan perangkat digital. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan data administrasi kependudukan yang akurat, terkini, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan serta pelayanan publik oleh pemerintah desa atau kelurahan.

Pada kegiatan gambar (b), Gambar tersebut menunjukkan kegiatan pendataan pemutakhiran data kelahiran dan kematian melalui wawancara langsung dengan warga. Mahasiswa KKN melakukan verifikasi data dengan mengumpulkan informasi terkait jumlah kelahiran, kematian, dan kondisi administrasi kependudukan yang dimiliki keluarga. Seluruh data dicatat secara sistematis untuk memastikan keakuratan dan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan. Kegiatan ini bertujuan mendukung tersedianya data kependudukan yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta pengambilan kebijakan di tingkat desa atau kelurahan.

Pada kegiatan pada Gambar (b), terlihat proses pendataan dan pemutakhiran data kelahiran dan kematian yang dilakukan oleh mahasiswa KKN melalui wawancara secara langsung dengan warga. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam upaya meningkatkan kualitas data kependudukan di tingkat desa atau kelurahan. Pendataan dilakukan dengan mendatangi rumah warga dan berkomunikasi secara langsung dengan anggota keluarga untuk memperoleh informasi yang aktual mengenai kondisi kependudukan. Pendekatan secara langsung dipilih agar mahasiswa dapat memperoleh informasi yang lebih akurat sekaligus

melakukan klarifikasi terhadap data yang telah tersedia sebelumnya.

Dalam proses wawancara, mahasiswa KKN mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran dan kematian dalam keluarga. Informasi yang dikumpulkan meliputi jumlah anggota keluarga, adanya kelahiran baru, anggota keluarga yang telah meninggal dunia, serta kondisi administrasi kependudukan yang dimiliki oleh setiap keluarga. Mahasiswa juga melakukan konfirmasi mengenai kepemilikan dan kesesuaian dokumen administrasi, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, dan dokumen terkait lainnya. Proses verifikasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya perubahan data yang belum tercatat atau belum diperbarui pada administrasi kependudukan di tingkat desa atau kelurahan.

Kegiatan pendataan tidak hanya berorientasi pada pengumpulan data, tetapi juga dilakukan melalui proses pemeriksaan dan pencocokan informasi yang diperoleh dari masyarakat. Mahasiswa mencatat setiap informasi secara sistematis berdasarkan hasil wawancara dan kondisi faktual yang ditemukan di lapangan. Apabila terdapat perbedaan antara data yang dimiliki warga dengan data administrasi sebelumnya, informasi tersebut dicatat sebagai bahan untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Dengan demikian, kegiatan ini dapat membantu mengidentifikasi adanya data yang belum diperbarui, data ganda, data warga yang telah meninggal tetapi masih tercatat sebagai penduduk, maupun kelahiran yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan.

Interaksi langsung dengan masyarakat juga memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman warga mengenai pentingnya administrasi kependudukan. Dalam proses pendataan, mahasiswa dapat memberikan penjelasan kepada warga mengenai pentingnya melaporkan setiap peristiwa kelahiran dan kematian kepada pemerintah desa atau kelurahan. Pelaporan yang dilakukan secara tepat waktu akan membantu pemerintah dalam menjaga keterbaruan data kependudukan. Selain itu, masyarakat menjadi lebih memahami bahwa kelengkapan dokumen kependudukan memiliki peran penting dalam memperoleh berbagai pelayanan publik dan pemenuhan hak administratif.

Bagi mahasiswa KKN, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran langsung mengenai pengelolaan data di masyarakat. Mahasiswa tidak hanya menerapkan kemampuan dalam melakukan pengumpulan dan pencatatan data, tetapi juga belajar berkomunikasi, melakukan verifikasi informasi, menjaga ketelitian, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa kualitas data sangat bergantung pada ketepatan proses pengumpulan, validasi, dan pemutakhiran informasi.

Secara keseluruhan, kegiatan pemutakhiran data kelahiran dan kematian pada Gambar (b) diharapkan dapat mendukung tersedianya data kependudukan yang lebih valid, akurat, dan sesuai dengan kondisi aktual masyarakat. Data yang telah diperbarui dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah desa atau kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menentukan sasaran program, serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Dengan adanya keterlibatan mahasiswa KKN dalam proses tersebut, kegiatan pengabdian tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk pendataan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan tata kelola administrasi kependudukan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya data kependudukan yang akurat dan mutakhir. Pengalaman di wilayah lain memperlihatkan bahwa data yang diperbarui dapat menjadi dasar informasi publik. Wahab et al. (2024) menunjukkan pentingnya sosialisasi pengelolaan data penduduk, sedangkan Indrayana et al. (2024) menunjukkan manfaat pendampingan layanan digital bagi kesadaran administrasi. Temuan tersebut mendukung model Bontoramba yang menggabungkan pendataan, edukasi, verifikasi, dan teknologi. (Djafar et al., 2024).

Dari perspektif tata kelola, hasil penelitian menegaskan bahwa pemutakhiran data perlu ditempatkan sebagai siklus, bukan kegiatan satu kali. Siklus tersebut dapat dimulai dari pelaporan warga, verifikasi oleh kader atau kepala lingkungan, rekapitulasi di kelurahan, pemeriksaan berkala, dan pemanfaatan data untuk perencanaan. Pola ini sejalan dengan kebutuhan penguatan administrasi pada tingkat lokal yang ditemukan dalam berbagai program pendampingan. Kurniati (2023) menunjukkan pentingnya penguatan administrasi pada tingkat RW; Wedasuwari et al.

(2023) menunjukkan efektivitas edukasi dan pendampingan; sedangkan Ritonga et al. (2024) memperlihatkan bahwa sosialisasi dapat memperjelas alur layanan kepada masyarakat. Pada sisi teknologi, Tedy et al. (2024) dan Seta et al. (2022) memperlihatkan bahwa sistem informasi dapat membantu pengelolaan data, sementara Fitriani dan Nur (2025) menunjukkan bahwa transformasi digital dapat memperluas akses layanan administrasi. Dengan demikian, model yang disarankan untuk Bontoramba adalah model hibrida: pendataan langsung tetap menjadi fondasi validasi, sedangkan teknologi digunakan untuk penyimpanan, pemutakhiran, dan penyajian data yang telah diverifikasi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pertama, pola distribusi peristiwa kependudukan di lima lingkungan Kelurahan Bontoramba menunjukkan dominasi kematian (58 peristiwa, 93,5%) atas kelahiran (4 peristiwa, 6,5%), dengan Lingkungan Bulucenrana mencatat kontribusi kematian ter tinggi dan Lingkungan Bontoramba menjadi satu-satunya lingkungan dengan pelaporan kelahiran lebih dari satu. Kedua, disparitas pelaporan antarlingkungan teridentifikasi secara tajam, terutama pada Lingkungan Dangko dan Moncong-Moncong yang tidak melaporkan satu pun peristiwa kelahiran, sebuah pola yang lebih mencerminkan lemahnya mekanisme pelaporan aktif dibandingkan kondisi demografis riil. Ketiga, kegiatan pendampingan pemutakhiran data yang dilakukan berkontribusi pada identifikasi kesenjangan data, penguatan kesadaran warga, dan penyediaan baseline dokumentasi bagi kelurahan, sehingga berpotensi meningkatkan tertib administrasi kependudukan secara berkelanjutan apabila ditindaklanjuti dengan mekanisme verifikasi berkala dan penguatan kapasitas kader lingkungan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa cakupan data yang hanya mencakup satu periode pendataan tanpa data historis multi-tahun, sehingga tidak dapat menganalisis tren temporal secara longitudinal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pendataan berkala (misalnya triwulanan) guna memperoleh gambaran tren yang lebih akurat, serta memperluas cakupan wilayah pembandingan ke kelurahan lain di Kabupaten Jeneponto untuk menguji konsistensi pola disparitas yang ditemukan dalam penelitian ini secara berkala dan terdokumentasi dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, A., Fitriana, J., Setiawan, A. A., & Safira, A. S. (2022). Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. *Jurnal Bina Desa*, 4(3). <https://doi.org/10.15294/jbd.v4i3.32542>
- Kurniati, P. S. (2023). Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada Rukun Warga 06 Kelurahan Antapani Wetan Kecamatan Antapani, Kota Bandung. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 50–59. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i1.41152>
- Seta, H. B., Theresiawati, & Indarso, A. O. (2023). Implementasi sistem informasi desa berbasis open source untuk administrasi kependudukan Desa Rawa Panjang, Bogor. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 1–7.
- Wedasuwari, I. A. M., Susrawan, I. N. A., Kurniawan, I. M. P., Wendistha, K. Y., & Jayanti, N. K. S. (2023). Edukasi pengelolaan administrasi kependudukan di Desa Darmasaba. *Prosiding Seminar Regional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 2(1), 108–115.
- Lydia, A. D., & Wibawani, S. (2023). Pendampingan layanan administrasi kependudukan melalui pelayanan “Sayang Warga” di Balai RW Kelurahan Semolowaru. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 257–262.

- Rohim, A. (2023). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan melalui Program KALIMASADA (studi kasus pada Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya). *The Indonesian Journal of Public Administration*, 9(2), 37–49. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i2.6871>
- Anugrah, P., Kustiawan, & Marliani, L. (2023). Kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 488–500. <https://doi.org/10.25157/dak.v10i3.11755>
- Aini, M. L., & Mursyidah, L. (2023). Assessing population administration service quality in rural settings: Penilaian kualitas layanan administrasi kependudukan di lingkungan pedesaan. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 23. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v1i0.1317>
- Dyah, A. G. (2024). Pentingnya peran pendamping masyarakat dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya. *ABDIMASKU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 147–154.
- Ritonga, N., Rangkuti, M. S. Z., Sari, A. M., Daulay, E., Faturrahman, Siahaan, F. H., Hasibuan, M., Sitorus, P. W., Tahnia, S., & Yuliana. (2024). Sosialisasi administrasi kependudukan guna mencapai pelayanan administrasi kependudukan yang efektif di Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 3920–3923. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i2.27662>
- Djafar, M. K., Sani, A., Somayasa, W., Muhtar, N., Gubu, L., Ruslan, Tenriawaru, A., & Budiman, H. (2024). Pemutakhiran data kependudukan bidang sosial dan ekonomi untuk mempercepat pembangunan yang efektif dan efisien di Kelurahan Poasia Kecamatan Abeli Kota Kendari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan*, 6(1), 25–30. <https://doi.org/10.33772/jpmit.v6i1.4>
- Tedy, F., Nani, P. A., Manehat, D. J., Siki, Y. C. H., Hokon, S. H. N. S., Bala, Y. J. E., & Bria, Y. P. (2024). Penerapan dan pelatihan penggunaan sistem informasi pengelolaan data administrasi desa dan data kependudukan di Desa Toobaun. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 6360–6366. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4602>
- Wahab, S. R., Angriani, L., Dayat, A. R., & Novianti, A. G. (2024). Sosialisasi pengelolaan data penduduk dan potensi kampung pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(11), 57–62. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10696520>
- Indrayana, S., Kurniawan, B. A., & Cahyani, T. R. (2024). Pendampingan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo guna meningkatkan pelayanan adminduk berbasis digital. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 8029–8033. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.33543>
- Fitriani, S., & Nur, D. I. (2025). Transformasi digital layanan administrasi kependudukan di Kecamatan Pakal melalui Klampid dan WhatsApp. *BHAKTI NAGORI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 60–71. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v5i1.4018

Halaman ini dikosongkan